



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJSITTI HUSNAENAH.
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 80920

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.312.000.000**

1. Tanah Seluas 198 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 32.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KOTA PALOPO ,
HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/60 m2 di KOTA PALOPO ,
HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/64 m2 di KOTA MAKASAR
BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/144 m2 di MAJENE, HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di BONE, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 333.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
3. MOTOR, SUZUKI NEX SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000



6. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	139.346.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.836.346.338
III. HUTANG	Rp.	57.075.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.779.271.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.